

# **ANALISIS IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DALAM BENTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KOTA MAGELANG TAHUN 2022-2023**

**Dhifan Rizqi Novandra<sup>1</sup> Budi Setiyono<sup>2</sup>, Nunik Retno Herawati<sup>3</sup>**

*<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro*

*<sup>2</sup> Departemen Politik Dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro*

*<sup>3</sup> Departemen Politik Dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro*

## **ABSTRAK**

Implementasi penyaluran BLT bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari DBHCHT menjadi salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang pada tahun 2022-2023 melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Program pelaksanaan tersebut didasari atas implementasi kebijakan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2022 dan Nomor 05 Tahun 2023. Implementasi dimaksudkan sebagai program bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok sebagai bentuk penghargaan dan penanggulangan sosial yang kemudian diteliti menggunakan adopsi teori Implementasi George C. Edward III (1980) yang menggunakan pendekatan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian implementasi kebijakan ini bertujuan untuk membuka informasi dan meneliti permasalahan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran BLT DBHCHT oleh Dinas Sosial Kota Magelang kepada 20 buruh pabrik rokok pada tahun 2022 dan 19 buruh pabrik rokok pada tahun 2023 di Kota Magelang. Melalui metode kualitatif, dalam penelitian ini menunjukkan adanya keberjalanan pelaksana kebijakan yang melalui peran besar Dinas Sosial dengan OPD yang berada di Kota Magelang. Perlu adanya perbaikan dalam bentuk publikasi komunikasi yang jauh lebih baik, agar implementasi tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat Kota Magelang

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan, BLT yang bersumber DBHCHT, Pemerintah Kota Magelang.

## **ABSTRACT**

*The implementation of BLT distribution for cigarette factory workers sourced from DBHCHT is one of the programs carried out by the Magelang City government in 2022-2023 through the allocation of the Tobacco Product Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT). The implementation program is based on the implementation of policies with Magelang Mayor Regulation Number 16 of 2022 and Number 05 of 2023. Implementation is intended as a direct cash assistance program for cigarette factory workers as a form of appreciation and social countermeasures which are then researched using the adoption of the theory of George C. Edward III (1980) Implementation which uses an approach to communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.*

*This policy implementation research aims to open information and research policy implementation problems related to the distribution of BLT DBHCHT by the Magelang City Social Service to 20 cigarette factory workers in 2022 and 19 cigarette factory workers in 2023 in Magelang City. Through qualitative methods, this study shows the implementation of policies through the big role of the Social Service with OPDs in Magelang City. There needs to be improvements in the form of much better communication publications, so that the implementation can be widely known by the people of Magelang City*

**Keywords:** *Implementation of Assistance Distribution Policy, BLT sourced from DBHCHT, Magelang City Government.*

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Salah satu alternatif untuk mewujudkan keberadaan negara sebagai penjamin sosial penanggulangan kemiskinan di masyarakat dapat dilihat dari beberapa program bantuan sosial baik berupa uang tunai atau bahan pangan dari pemerintah. Bantuan sosial tersebut dapat bersumber dari alokasi apa pun, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah belanja dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan risiko sosial, guna memperkuat kapasitas ekonomi.

APBN secara garis besar memang terdapat anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kemiskinan melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT), namun terdapat

juga bantuan sosial bagi masyarakat yang dialokasikan melalui alokasi khusus seperti Dana bagi Hasil (DBH). DBH merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Kementerian Keuangan, 2020). DBH juga memiliki bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dan hasil keuangan daerah masing-masing.

Pemanfaatan DBH sebagai bentuk pemberian bantuan pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan oleh alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Hal tersebut tertuang dalam Permenkeu Nomor 7/PMK.07/2020 pasal 2 ayat (1)

huruf (c) tentang pemanfaatan DBHCHT untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial. Melalui Permenkeu tersebut, alokasi DBHCHT dapat dimungkinkan untuk dialokasikan oleh daerah untuk mengentaskan permasalahan sosial, salah satunya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pemanfaatan DBHCHT sebagai bantuan sosial dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Magelang untuk melakukan pembinaan sosial tersebut dengan pemberian bantuan langsung tunai yang bersifat sosial. Bantuan ini hanya diberikan secara khusus untuk membina masyarakat Kota Magelang yang berprofesi sebagai buruh pabrik rokok dengan standar penghasilan yang sangat minim.

Pemanfaatan tersebut terlaksana dalam kepemimpinan Walikota Magelang M. Nur Azis terutama pada tahun 2022 hingga 2023. Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT di Kota Magelang ini dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang di mana pemanfaatan DBHCHT dapat dilakukan untuk memberikan apresiasi dan pemberian pencegahan terhadap dampak bagi pekerja di pabrik rokok.

Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang kemudian melakukan implementasi kebijakan tersebut yang didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07 /2022 yang menjadi dasar hukum Perwal Kota Magelang No. 16 Tahun 2022 Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau Kota Magelang Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /PMK.07/2023 yang menjadi dasar hukum Perwal Kota Magelang No. 05 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Magelang Tahun 2023.

Melalui Perwal Kota Magelang tersebut, tujuan adanya pemanfaatan DBHCHT sebagai BLT bagi buruh pabrik rokok di Kota Magelang dituangkan pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “Bantuan Langsung Tunai dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi buruh pabrik rokok” dan ayat (2) yang berbunyi, “Pemberian Bantuan Langsung Tunai bertujuan untuk melindungi buruh pabrik rokok dari Risiko Sosial dan sebagai pelaksanaan salah satu program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari DBHCHT” (Perwal Kota Magelang No. 5 Tahun 2023, 2023). Secara jelas tujuan sosial dari BLT DBHCHT Kota Magelang tahun 2022-2023 digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi buruh pabrik rokok di Kota Magelang, selain itu juga digunakan untuk perlindungan bagi buruh pabrik rokok dari risiko sosial.

Implementasi kebijakan penyaluran BLT yang bersumber DBHCHT menjadi implementasi kebijakan yang menarik. Pasalnya secara khusus kebijakan ini hanya mengakomodir penyaluran BLT kepada buruh rokok di Kota Magelang bukan kepada masyarakat umum. Hal ini memunculkan ketertarikan permasalahan mengapa BLT yang bersumber DBHCHT hanya diberlakukan secara khusus tidak

diberikan secara umum kepada masyarakat Kota Magelang di tahun 2022 dan 2023? Padahal kondisi masyarakat miskin dan kategori tidak mampu tidak hanya menjangkit pada masyarakat yang berprofesi sebagai buruh pabrik rokok di Kota Magelang.

Tujuan dari penelitian di antaranya, menganalisis analisis implementasi penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Magelang tahun 2022-2023, dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan sebagai bentuk analisis implementasi penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Magelang tahun 2022-2023.

Selaras dengan analisa implementasi kebijakan penyaluran BLT bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari DBHCHT Kota Magelang tahun 2022-2023, maka dalam penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III. Permasalahan dan analisa implementasi kebijakan program BLT DBHCHT tersebut dijabarkan dalam empat (4) elemen, di antaranya; komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **PEMBAHASAN**

Penyajian, pembahasan, dan analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini kemudian didasari atas hasil olah data yang dilakukan dengan wawancara kepada Hadi Sutopo yang merupakan Sekretaris Dinsos Kota Magelang, Krisna yang merupakan Pengolah Data Dinsos Kota Magelang, dan Dwi Ambar Pratiknyo yang merupakan Penyuluh Sosial Ahli Madya Dinsos Kota Magelang. Selain itu untuk

memperkuat analisis tersebut, dalam pembahasan ini juga menyajikan data sekunder yang berasal dari dokumen dan sumber elektronik yang diakses melalui *website* Dinas Sosial Kota Magelang. Selanjutnya, penyajian data dalam penelitian ini disajikan secara runtut mengadopsi pemikiran Implementasi George C. Edward III yang menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kemudian, secara detail pembahasan tersebut dibahas pada subbab selanjutnya.

## **PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

Proses implementasi kebijakan mengenai penyaluran BLT bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari DBHCHT Kota Magelang tahun 2022-2023 secara khusus merupakan penyaluran BLT yang difokuskan dari alokasi APBN Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) atau dikenal dengan implementasi BLT DBHCT. Proses implementasi kebijakan oleh Pemkot Magelang ini dibeban tanggung jawabkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Magelang secara langsung yang ditunjukkan kepada buruh pabrik rokok. Setidaknya melalui implementasi kebijakan ini telah menysasar pada 20 (dua puluh) masyarakat Kota Magelang di tahun 2022 (Pekot Magelang, 2023: 83) dan menysasar pada 18 (delapan belas) masyarakat Kota Magelang di tahun 2023 (Pekot Magelang, 2024: 88). Proses implementasi ini kemudian melibatkan komunikasi, penyediaan sumber daya, diposisi (nilai), dan struktur birokrasi. Pembahasan tersebut kemudian disajikan secara mendalam pada sub-subbab berikut yang saling berkaitan.

## **KOMUNIKASI YANG BERLANGSUNG**

### **KEJELASAN KOMUNIKASI**

Komunikasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan program BLT di Kota Magelang memuat komunikasi internal dan eksternal yang dilakukan oleh Dinsos Kota Magelang pada tahun 2022-2023. Proses komunikasi internal dilakukan oleh SDM Dinsos antar bidang, sedangkan proses komunikasi eksternal dilakukan dengan Dinsos dengan OPD yang berkaitan dengan implementasi kebijakan BLT DBHCT Kota Magelang.

Komunikasi internal dilakukan oleh SDM Dinsos Kota Magelang dilakukan dengan cara pendampingan dan penguatan SDM. Komunikasi tersebut terjadi dari perencanaan program hingga penyaluran program. Tidak Hanya hal tersebut, Dinsos Kota Magelang dalam proses komunikasi juga bertanggung jawab atas proses *monitoring* dan evaluasi. Proses komunikasi oleh Dinsos Kota Magelang pada saat itu mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dinsos Kota Magelang melakukan komunikasi dengan tujuan agar bantuan ini tepat sasaran dari proses pendataan hingga penyaluran. Proses pendampingan komunikasi dilakukan untuk mencapai kejelasan Implementasi Program BLT DBHCT di Kota Magelang.

Selanjutnya, dengan jelas melalui proses komunikasi tersebut ditunjukkan untuk mendapatkan kejelasan bagi pelaksana kebijakan. Kejelasan yang dimaksud adalah adanya kesepahaman mengenai pelaksanaan kebijakan penyaluran/ penyaluran BLT DBHCT di Kota Magelang tahun 2022-2023 untuk

memberikan bantuan pemulihan pasca *Covid-19*, pemberian penghargaan, dan pencegahan dampak sosial bagi masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok di Kota Magelang. Proses memperoleh kejelasan dilakukan komunikasi secara internal antara SDM pelaksana kebijakan tersebut. Selain perolehan kejelasan, juga didorong adanya proses transmisi yang dilakukan oleh Dinsos Kota Magelang dengan OPD Kota Magelang yang lain untuk mencapai tujuan kebijakan penyaluran BLT di Kota Magelang. Proses transmisi tersebut dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

### **TRANSMISI DALAM KOMUNIKASI**

Transmisi dalam komunikasi implementasi kebijakan ini dapat dilihat melalui penyampaian komunikasi berupa koordinasi Dinsos Kota Magelang dengan OPD Kota Magelang lainnya. Pelaksanaan koordinasi ini melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Kota Magelang. Selain melakukan koordinasi pada tingkatan atas/ Walikota Magelang, koordinasi juga dilakukan intens pada dinas-dinas terkait.

Terdapat proses yang panjang dalam implementasi kebijakan BLT DBHCT. Pertama diawali dengan koordinasi dengan Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang, kemudian proses koordinasi dengan Disnaker Kota Magelang untuk inventarisasi buruh pabrik rokok yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Selanjutnya, koordinasi kepada Disdukcapil Kota Magelang untuk melakukan verifikasi kependudukan yang terintegral dengan data Kementerian Dalam Negeri. Setelahnya

koordinasi penetapan Perwal yang dilakukan bersama Bagian Hukum Setda Kota Magelang. Selain melibatkan Bagian Hukum Setda Kota Magelang, juga melibatkan koordinasi bersama Inspektorat Kota Magelang untuk melakukan *review*, baru setelahnya dapat disalurkan kepada buruh pabrik rokok yang telah terdaftar layak mendapatkan BLT DBHCHT.

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinsos juga berlanjut pada tingkatan yang berada di bawahnya. Hal ini dilakukan oleh Dinsos dengan berkoordinasi kepada pihak Kecamatan ataupun Kelurahan yang berada di Kota Magelang. Peran komunikasi ini dilakukan oleh Dinsos dan Kecamatan atau Kelurahan dengan tujuan dan fungsi sebagai penyebaran informasi publik. Kecamatan dan kelurahan dalam implementasi ini bertugas sebagai sarana sosialisasi mengenai implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT.

Komunikasi kepada OPD yang berkaitan dengan BLT DBHCHT telah dilakukan kepada Dinsos di Kota Magelang, namun komunikasi pada masyarakat mengenai BLT DBHCHT ini tidak dilakukan secara langsung oleh Dinsos Kota Magelang.

Transmisi komunikasi yang dilakukan oleh Dinsos Kota Magelang pada implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT telah dilakukan dengan membuka komunikasi kepada Walikota Magelang. Selain itu untuk menjaga implementasi berjalan dengan semestinya, Dinsos Kota Magelang juga berkomunikasi kepada Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Setda, Disnaker, Disdukcapil, dan Inspektorat Kota Magelang untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi kinerja. Transmisi ini menjadi transmisi komunikasi yang bersifat horizontal kepada

sesama OPD di Kota Magelang untuk berkoordinasi. Sedangkan komunikasi yang dilakukan Dinsos pada kelurahan, kecamatan, dan masyarakat bersifat transmisi komunikasi vertikal ke bawah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan.

## **KONSISTENSI KOMUNIKASI**

Komunikasi dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang secara ideal tidak hanya mencapai komunikasi yang memuat kejelasan dan transmisi. Kedua hal tersebut akan berjalan apabila terdapat juga konsistensi yang berlangsung, baik secara dalam internal maupun eksternal Dinsos Kota Magelang yang terlibat dalam implementasi kebijakan BLT DBHCHT di Kota Magelang tahun 2022 dan 2023.

Selaras dengan hal tersebut, setidaknya dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT oleh Dinsos Kota Magelang melakukan komunikasi intens minimal sebanyak dua (2) kali dalam setahun. Sosialisasi yang dilakukan seminimalnya dengan intensitas satu (1) kali, dan setelahnya juga terdapat evaluasi dalam akhir tahun. Dalam kedua pernyataan tersebut setidaknya, intensitas komunikasi yang dijalankan terdapat dijumpai minimal dua (2) kali hingga maksimal lima (5) kali dalam setahun untuk membahas dan koordinasi implementasi penyaluran BLT DBHCHT yang dilakukan oleh Dinsos Kota Magelang pada tahun 2022 dan 2023.

Konsistensi komunikasi dalam implementasi penyaluran BLT DBHCHT juga dilakukan melalui publikasi yang dilakukan melalui website Dinsos Kota Magelang. Namun, data lapangan menunjukkan hanya terdapat satu publikasi artikel berita dengan judul “Dinas Sosial

Salurkan Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok”, selain itu tidak ditemukan dokumentasi lain yang berada website tersebut mengenai publikasi penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022 ataupun pada tahun 2023. Lebih dalamnya, hasil penelusuran data pada platform Instagram Dinas Sosial Kota Magelang juga tidak dijumpai adanya konten yang membahas atau menyajikan dokumentasi implementasi BLT DBHCHT di Kota Magelang. Artinya dukungan konsistensi mengenai publikasi pada website atau media sosial pada komunikasi implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT tidak berjalan dengan baik.

## **SUMBER DAYA PENYALURAN BLT DBHCHT**

### **KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang tersedia dengan baik mulai dari tingkatan atas hingga tingkatan kecil yang diambil melalui SDM internal Dinsos Kota Magelang. SDM Dinsos Kota Magelang yang bersumber dari dua bidang kerja sosial untuk melakukan implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang. SDM tersebut tersedia dari bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial serta bidang Perlindungan Jaminan Sosial.

Penanggung jawab utama implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang dilakukan oleh SDM bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang berada di Sub Koordinator Data kesejahteraan Rakyat. Pernyataan tersebut memberikan detail

mengenai siapa yang menjadi penanggung jawab penyedia SDM untuk melaksanakan kebijakan tersebut di Kota Magelang.

Selain SDM, sumber daya fasilitas dan anggaran juga berperan dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang tahun 2022-2023. Sumber daya fasilitas dan sumber daya anggaran ini merupakan elemen penunjang berlangsungnya implementasi kebijakan tersebut. Kemudian pembahasan tersebut dijelaskan pada poin berikutnya.

## **SUMBER DAYA FASILITAS DAN SUMBER DAYA ANGGARAN**

Sumber daya fasilitas dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang tahun 2022-2023 tersedia dari ketersediaan ruang untuk melakukan pengelolaan data dan ketersediaan prasarana ketika pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut berlangsung. Ketersediaan ruang telah disediakan dengan baik oleh Dinsos Kota Magelang yang berada kantor kerja yang beralamat Jl. Pangeran Diponegoro No.11, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Fasilitas yang disediakan oleh Dinsos Kota Magelang untuk menunjang implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang tahun 2022-2023 meliputi fasilitas media berupa laman website untuk melakukan publikasi, dan fasilitas ruangan khusus yang disediakan pada Kantor Dinsos Kota Magelang untuk melakukan koordinasi. Sedangkan fasilitas fisik penunjang pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang disediakan dengan cara kolaborasi antara perusahaan rokok dan Dinsos Kota Magelang.

Fasilitas ketika pelaksanaan hari-H penyaluran BLT DBHCHT Kota Magelang disediakan oleh pihak perusahaan rokok. Ketersediaan tersebut berupa ketersediaan ruang dan fasilitas meja yang digunakan untuk menampung/ tempat bagi penerima BLT DBHCHT. Namun terdapat juga fasilitas audio yang disediakan oleh Dinsos, fasilitas tersebut berupa alat audio, atau alat peraga berupa MMT untuk pelengkap sarana dan prasarana kegiatan penyaluran BLT DBHCHT.

Selanjutnya, yang paling utama dalam penyediaan anggaran (untuk fasilitas fisik) adalah penyediaan perangkat bagi pengolahan data. Selain perangkat, ketersediaan fasilitas untuk tempat penerimaan juga disediakan oleh Dinsos Kota Magelang.

Berkaitan dengan sumber daya fasilitas, sumber daya anggaran juga menjadi pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini. Pelaksanaan implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang tahun 2022 dan 2023 bersumber dari dana bagi hasil cukai dan tembakau.

**Tabel Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota**

Besaran Anggaran	2022	2023
Nasional	Rp3.870.600.000.000,00	Rp5.470.207.767.000,00
Jawa Tengah	Rp263.988.174.000,00	Rp321.949.955.000,00
Kota Magelang	<b>Rp7.857.023.000,00</b>	<b>Rp11.932.148.000,00</b>
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07 /2022	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /PMK.07/2023

Sumber; Kementerian Keuangan (2022-2023)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sumber dana penyaluran

BLT DBHCHT di Kota Magelang yang diperoleh melalui DBHCHT pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2022, DBHCHT yang diperoleh Kota Magelang memiliki besaran Rp7.857.023.000,00. Sedangkan pada tahun 2023 Kota Magelang memperoleh kenaikan dengan besaran Rp 11.932.148.000,00. Dengan jumlah perolehan anggaran sebanyak itu tentu saja anggaran tidak hanya dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang, akan tetapi juga dilakukan untuk pengembangan daerah pada urusan lainnya.

Besaran anggaran implementasi penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022 dan 2023 dapat ditunjukkan dengan adanya pelaporan yang telah ditulis pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 dan 2023 yang menyatakan sebagai berikut;

**Tabel Data Rincian Implementasi BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022 dan 2023**

Besaran Anggaran	2022	2023
Rencana Semester 1	27	19
Realisasi	21	19
Pelaksanaan	20	19
Besaran Bantuan	<b>Rp300.000,00</b>	<b>Rp300.000,00</b>
Besaran Bulan	7	3
Total	<b>Rp42.000.000,00</b>	<b>Rp17.100.000,00</b>
Rencana Semester 2	-	19
Realisasi	-	19
Pelaksanaan	-	18
Besaran Bantuan	-	<b>Rp300.000,00</b>
Besaran Bulan	-	6
Total	-	<b>Rp32.400.000,00</b>

<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>Rp42.000.000,00</b>	<b>Rp49.500.000,00</b>
Dasar Hukum	Perwal Kota Magelang No. 16 Tahun 2022	Perwal Kota Magelang No. 05 Tahun 2023

Sumber; LKjIP Kota Magelang Tahun 2022 dan 2023 dengan olah Pribadi (2024)

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa anggaran implementasi penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022 dan 2023 terdapat perbedaan. Hal ini dapat dijelaskan melalui kutipan data yang diperoleh melalui LKjIP Kota Magelang Tahun 2022 yang menyatakan bahwa perencanaan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022 ditargetkan pada 27 masyarakat yang ber-KTP Kota Magelang dan berprofesi sebagai buruh pabrik rokok. Namun realisasinya hanya terdapat 21 masyarakat yang ber-KTP Kota Magelang, ketika pelaksanaan jumlah penerima BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022 mengalami satu jumlah orang dikarenakan meninggal dunia, sehingga pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022 hanya kepada 20 orang buruh pabrik rokok (Pemerintah Kota Magelang, 2023). Kedua puluh orang penerima BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022 merupakan buruh pabrik rokok yang beraal dari CV Daun Jeruk dan PD Menjangan Rejeki Kota Magelang. (Dinsos Kota Magelang, 2022). Besaran yang diterima BLT yang diterima dengan nominal Rp300.000,00 yang dialokasikan selama tujuh (7) bulan dengan dua (2) tahap penerimaan. Sehingga besaran anggaran implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang tahun 2022 adalah Rp42.000.000,00.

Selanjutnya, penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2023 mengalami penurunan jumlah. Pada tahun 2023, jumlah penerima BLT DBHCHT sebanyak 19 orang pada semester 1 dan 18 orang pada semester 2, dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaan penerima jumlah BLT DBHCHT Kota Magelang tahun 2022 tidak mengalami perubahan pada semester 1, namun baru mengalami perubahan dengan berkurangnya satu (1) penerima semester 2 dikarenakan penerima meninggal dunia. Besaran nominal yang diterima BLT DBHCHT tahun 2023 adalah Rp300.000,00 dengan alokasi anggaran selama tiga (3) bulan untuk semester 1 dan enam (6) bulan untuk semester 2. Sehingga apabila di akumulasi pada semester 1 pencairan anggaran BLT DBHCHT Kota Magelang Tahun 2023 sebesar Rp17.100.000,00, dan semester 2 sebesar Rp32.400.000,00. Oleh karenanya jumlah sumber daya anggaran yang digunakan pada implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT Kota Magelang tahun 2023 adalah sebesar Rp49.500.000,00.

#### **ADOPSI DISPOSISI (NILAI) DALAM PELAKSANAAN**

Disposisi dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT Kota Magelang tahun 2022 dan tahun 2023 dapat ditunjukkan melalui komitmen bersama yang diciptakan oleh SDM Dinsos Kota Magelang sebagai pelaksana kebijakan. Selain itu komitmen tersebut didukung dengan nilai tanggung jawab dan nilai kemudahan pelaksanaan untuk mencapai tujuan kebijakan penyaluran BLT DBHCHT Kota Magelang yang sesuai dengan Perwal Kota Magelang No. 16 Tahun 2022 dan No. 05 Tahun 2023.

Seluruh SDM Dinsos Kota Magelang berupaya untuk berkomitmen dalam pelaksanaan implementasi penyaluran BLT ini yang dimuat pemberian pelayanan yang terbaik. Hal ini sudah semestinya menjadi kewajiban Dinsos Kota Magelang sebagai dinas yang menangani permasalahan sosial di Kota Magelang terutama dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Nilai yang diambil dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT Kota Magelang tahun 2022 dan tahun 2023 banyak sekali, apabila ditelisik nilai ke luar sudah seharusnya program ini adalah program yang baik untuk membantu kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karenanya untuk mendorong penciptaan kesejahteraan sosial bagi masyarakat diperlukan pelayanan yang baik, yang sesuai dengan aturan, dan minim dengan penyimpangan yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Magelang.

Pelaksanaan implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT Kota Magelang tahun 2022 dan tahun 2023 menjadi nilai kepedulian dan kesetiakawanan sosial, hal ini menjadi inti kewajiban Dinas Sosial di Kota Magelang. Oleh karena melalui inti kewajiban tersebut kemudian mendorong Dinsos Kota Magelang untuk memenuhi layanan membantu keluarga yang tidak mampu terutama pada sektor kebutuhan dasar.

Sejauh dalam pelaksanaannya terjadi minim kendala yang menyulitkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT Kota Magelang tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi hal yang mudah sebagai implementasi kebijakan yang dilaksanakan rutin. Sepanjang tahun 2022-2023 tidak dijumpai kendala produk hukum, sasaran bantuan, atau besaran

bantuan yang diterima kepada buruh pabrik rokok di Kota Magelang.

Selain itu, setidaknya untuk mencapai komitmen dan kemudahan pelaksanaan implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang tahun 2022-2023 dibutuhkan ketepatan profesionalisme untuk melaksanakan kebijakan sesuai mekanisme. Hal tersebut memuat bagaimana Dinsos Kota Magelang sebagai pelaksana kebijakan mampu melakukan kebijakan yang tidak memihak dan pelaksanaan kebijakan BLT DBHCHT tepat sasaran sesuai dengan persyaratan serta ketentuan.

## **STRUKTUR BIROKRASI**

Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat melalui Perwal Kota Magelang Nomor 16 tahun 2022 dan Nomor 5 Tahun 2023. Dalam perwal tersebut secara jelas diatur proses tahap pendataan hingga pelaporan dari penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang. Proses tersebut kemudian dapat disajikan dengan gambar sebagai berikut;

**Tabel Matriks Struktur Birokrasi Implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang tahun 2022 dan 2023**

No.	Jenis Pelaksanaan	Nomenklatur Perwal	
		Perwal Kota Magelang No. 16 Tahun 2022	Perwal Kota Magelang No. 05 Tahun 2023
1	Pendataan oleh Buruh Pabrik Rokok Oleh Disnaker Kota Magelang	Pasal 6 Ayat (1) dan (2)	Pasal 5 Ayat (1) dan (2)

No.	Jenis Pelaksanaan	Nomenklatur Perwal	
		Perwal Kota Magelang No. 16 Tahun 2022	Perwal Kota Magelang No. 05 Tahun 2023
2	Penghimpunan Data Disnaker kepada Dinsos Kota Magelang	Pasal 6 Ayat (3)	Pasal 5 Ayat (3)
3	Pengecekan data kependudukan oleh Disdukcapil Kota Magelang	Pasal 7 Ayat (1)	Pasal 6 Ayat (1)
4	Verifikasi data melalui Disdukcapil dengan Akses Portal data kependudukan Kemendagri	Pasal 7 Ayat (1)	Pasal 6 Ayat (1)
5	Verifikasi berkas penerima oleh Dinsos dan Disnaker Kota Magelang	Pasal 7 Ayat (2) dan (3)	Pasal 6 Ayat (3)
6	Validasi Data oleh Dinsos dan Disnaker Kota Magelang	Pasal 8 Ayat (1)-(3)	Pasal 7 Ayat (1)-(3)
7	Penyerahan data oleh Dinsos Kota Magelang kepada Inspektorat untuk di review	Pasal 8 Ayat (4)	Pasal 7 Ayat (4)
8	Penetapan Data perolehan BLT DBHCHT di Kota Magelang oleh Walikota	Pasal 8 Ayat (6)	Pasal 7 Ayat (6)
9	Penyaluran oleh Dinsos, yang didampingi Disnaker dan Disdukcapil di Pabrik Rokok kepada penerima BLT DBHCHT di Kota Magelang	Pasal 9-11	Pasal 8-11
10	Pelaporan program oleh Dinsos Kota Magelang kepada Walikota	Pasal 12	Pasal 12

Sumber; Pemerintah Kota Magelang dengan olah pribadi (2024)

Tabel tersebut menjelaskan matriks perbedaan nomenklatur Struktur Birokrasi dan Standar Operasional dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang tahun 2022-2023. Melalui tabel tersebut setidaknya terdapat sepuluh alur untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut, diantaranya; Pendataan oleh Buruh Pabrik Rokok Oleh Disnaker Kota Magelang; Penghimpunan Data Disnaker kepada Dinsos Kota Magelang; Pengecekan data kependudukan oleh Disdukcapil Kota Magelang; Verifikasi data melalui Disdukcapil dengan Akses Portal data kependudukan Kemendagri; Verifikasi berkas penerima oleh Dinsos dan Disnaker Kota Magelang; Validasi Data oleh Dinsos dan Disnaker Kota Magelang; Penyerahan data oleh Dinsos Kota Magelang kepada Inspektorat untuk di review; Penetapan Data perolehan BLT DBHCHT di Kota Magelang oleh Walikota; Penyaluran oleh Dinsos, yang didampingi Disnaker dan Disdukcapil di Pabrik Rokok kepada penerima BLT DBHCHT di Kota Magelang; dan Pelaporan program oleh Dinsos Kota Magelang kepada Walikota.

Melalui struktur birokrasi dan SOP tersebut, Dinsos Kota Magelang mampu melakukan mitigasi apabila dalam proses implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang mengalami kendala. Apabila di tengah-tengah proses berjalannya implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang mengalami kendala, maka dapat diselesaikan dengan agenda *monitoring* dan evaluasi program. Sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak kesalahan yang fatal.

## **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLT DBHCHT KOTA MAGELANG TAHUN 2022-2023**

Analisis implementasi penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dalam bentuk BLT di Kota Magelang tahun 2022-2023 memang dapat dinyatakan sebagai kebijakan yang terimplementasikan dengan baik. Hal ini merujuk dari tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT Kota Magelang tahun 2022 dan 2023 yang sesuai dengan pendekatan Implementasi Kebijakan oleh Edward III. Kondisi ini menunjukkan adanya komunikasi yang mencapai transmisi, kejelasan, dan konsistensi; sumber daya yang meliputi manusia, fasilitas, dan anggaran tersedia dengan baik; adanya pemahaman disposisi kebijakan dari pelaksana; dan adanya struktur birokrasi yang mengikat dan memudahkan pelaksanaan.

Implementasi kebijakan penyaluran BLT DHCHT Kota Magelang tahun 2022-2023 setidaknya mengalami minim kendala dikarenakan target yang dicapai juga terbatas hanya kepada masyarakat Kota Magelang yang berprofesi sebagai buruh pabrik rokok. Syarat penerima BLT ini seperti yang diatur pada Perwal Kota Magelang No. 16/2022 dan No. 05/2023 juga tidak terlalu rumit dan tidak ditentukan seperti apa kriteria penerima. Oleh karenanya implementasi kebijakan ini mudah untuk dilaksanakan oleh Dinsos Kota Magelang.

Pembuktian keberhasilan implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT Kota Magelang tahun 2022-2023 dalam penelitian ini hanya terbatas pada sisi pelaksanaan oleh kelembagaan. Setidaknya

juga diperlukan pembuktian yang mendalam mengenai implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT Kota Magelang yang dikorelasikan dengan efektivitas tujuannya untuk melakukan penghargaan kesejahteraan sosial dan penanggulangan dampak sosial bagi buruh pabrik rokok yang menerima bantuan ini. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan narasumber yang dapat diwawancarai dari sudut pandang penerima bantuan BLT DBHCHT di Kota Magelang, sehingga testimonial yang diberikan dari penerima bantuan mengenai bantuan yang diterima tidak dimunculkan. Selanjutnya, dari segi pelaporan juga tidak dijumpai publikasi dari Pemkot Magelang atau Dinsos Kota Magelang mengenai evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang Tahun 2022-2023.

## **PENUTUP SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis implementasi penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Magelang tahun 2022-2023 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

Analisis implementasi penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Magelang tahun 2022-2023 berjalan dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan ketercapaian target pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022 yang telah tersalurkan kepada 20 orang pekerja dari alokasi perencanaan 21 orang pekerja, dan pada tahun 2023 yang telah tersalurkan sejumlah 18 orang pekerja

dari 19 pekerja/ buruh pabrik rokok di Kota Magelang.

Keberhasilan tersebut juga diwujudkan oleh proses komunikasi, penyediaan sumberdaya, adopsi disposisi, dan struktur birokrasi yang baik dari Dinas Sosial Kota Magelang tahun 2022-2023. Proses komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Magelang meliputi adanya kejelasan dari komunikasi yang selaras dengan tujuan kebijakan dan didukung dengan proses transmisi yang baik untuk melakukan koordinasi antar OPD. Namun, dari segi komunikasi masih terhambat pada konsistensi publikasi yang tidak baik.

Ketersediaan sumber daya yang baik menjadi salah satu dukungan bagi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sumber daya manusia yang mampu melakukan pengelolaan, sumber daya fasilitas yang tersedia secara fisik meskipun harus berkolaborasi dengan pihak pabrik rokok, serta sumber daya anggaran yang secara pasti dianggarkan melalui DBHCHT setiap tahunnya untuk melaksanakan implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022 dan 2023.

Dukungan disposisi untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dengan adanya komitmen dan tanggung jawab SDM Dinas Sosial Kota Magelang untuk melaksanakan implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT tahun 2022-2023. Hal tersebut juga mendorong adanya kemudahan pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Sosial Kota Magelang.

Terakhir, keberhasilan struktur birokrasi dapat ditunjukkan dengan adanya muatan struktur birokrasi dan SOP

pelaksanaan kebijakan yang jelas tertuang pada Perwal Kota Magelang No. 16 Tahun 2022 dan Perwal Kota Magelang No. 05 Tahun 2023. Aturan ini menjadi pedoman yang memudahkan untuk menjalankan tugas, koordinasi, dan pelaksanaan teknis mengenai implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022-2023.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan maka dapat diberikan saran sebagai bentuk perbaikan dalam penelitian ini, diantaranya;

1. Saran kepada Pemerintah Kota Magelang, seharusnya dan sebaiknya implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang harus dipertahankan konsistensi pelaksanaannya sebagai kebijakan yang mampu memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Magelang, terutama yang bekerja di sektor buruh pabrik rokok. Selain itu, perbaikan juga harus dilakukan dengan pemberian fasilitas yang lebih memadai bagi pengelolaan publikasi komunikasi pada implementasi kebijakan ini penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun yang akan datang.
2. Kekurangan dalam penelitian ini terbatas pada narasumber penelitian yang hanya merujuk pada Dinas Sosial Kota Magelang. Oleh karenanya diperlukan perbaikan terhadap penambahan subjek penelitian yang bersumber dari OPD yang lain dan yang saling berkaitan dengan implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT Kota Magelang sehingga mampu memberikan kekayaan data dan

kekayaan terhadap sudut pandang pelaksana kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Creswell, J. W. (2007). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. California: SAGE.
- Dunn, W. N. (1981). *Public Policy Analysis And Introduction*. USA: Prentice Hall.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Fishcer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis (Theory, Politics, and Methods)*. New York: CRC Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. London: SAGE Publications.
- J.Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya .
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Laswell, H. D. (1951). *The Policy Orientation*. California: Stanford University Press.
- Lynd, R. S. (1939). *Knowledge for What?* Princeton: Princeton University Press.
- Raco, J., & R.Semiawan, C. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Radin, B. A. (2000). *Beyond Machiavelli: Policy analysis comes of age*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Schofield, J., & Sausman, C. (2004). Symposium on Implementing Public Policy: Learning from Theory and Practice: Introduction. *Public Administration*, 235.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus (4th ed.)*. Los Angeles: Sage Publications, Inc.
- Stake, R. (1995). *The art of Case Study Research*. California: SAGE.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Vedung, E. (2017). *PUBLIC POLICY AND PROGRAM EVALUATION*. New York: Routledge.
- Weiss, C. H. (1972). *Evaluation research : methods for assessing program effectiveness*. New Jersey: Carol H. Weiss. Englewood Cliffs.
- Wijaya, H., & Umrati. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

### Skripsi dan Jurnal

- Djuju. (2006). Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 72*.
- Gultom, H., & dkk. (2020). ANALISIS PENGARUH PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.21 No.1*.

Nadhifah, L. R., & Mustofa, N. H. (2021). Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking* 3, 12.

#### Dokumen

Keuangan, K. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga*.

Keuangan, K. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022*.

Keuangan, K. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /PMK.07/2023*.

Magelang, B. K. (t.thn.). *BPS Kota Magelang*. Diambil kembali dari BPS Kota Magelang: <https://magelangkota.bps.go.id>

Magelang, Pemerintah Kota. (2023) *Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Magelang 2022*.

Magelang, Pemerintah Kota. (2024) *Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Magelang 2023*.

Magelang, Pemerintah Kota. (2022) *Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Magelang Tahun 2022*.

Magelang, Pemerintah Kota. (2023) *Peraturan Walikota Magelang Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok*

Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Magelang Tahun 2023.

RI, D. (t.thn.). Diambil kembali dari Undang Undang Dasar 1945 - Amandemen.

#### Sumber Internet

borobudurnews.com. (2020). *HORE....Bansos Bagi 12 Ribu KK Di Kota Magelang Cair Bulan Ini*. Diambil kembali dari borobudurnews.com:

<https://borobudurnews.com/hore-bansos-bagi-12-ribu-kk-di-kota-magelang-cair-bulan-ini/>

Magelang, H. (2021, 7 19). *11.124 Warga Kota Magelang Terima Bantuan Beras dari Kemensos*. Diambil kembali dari Humas Magelang: <https://humas.magelangkota.go.id/11-124-warga-kota-magelang-terima-bantuan-beras-dari-kemensos/>

RUKMORINI, R. (2021, September 6). *Pemkot Magelang Tunggu Arahan Pusat Terkait Penyaluran Bansos*. Diambil kembali dari kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/06/pencairan-bantuan-menunggu-instruksi-pusat>

RUKMORINI, R. (2021, September 23). *Wali Kota Magelang Minta Dana BLT Tak Tepat Sasaran Didonasikan*. Diambil kembali dari kompas.id: [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/23/dana-blt-yang-tidak-tepat-sasaran-sebaiknya-didonasikan?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/23/dana-blt-yang-tidak-tepat-sasaran-sebaiknya-didonasikan?open_from=Search_Result_Page)